

► ILEGAL FISHING KAPAL MALAYSIA



Aparat keamanan memasang garis polisi pada kapal nelayan Malaysia dengan nomor lambung SLFA 4935 saat diamankan di pelabuhan perikanan Samudera Lampulo, Banda Aceh, Minggu (28/1), karena diduga melakukan *illegal fishing* di perairan Selat Melaka, Aceh Timur.

Antara/Ampelsa

► PERSEKONGKOLAN TENDER

KPPU Siap Adu Bukti

JAKARTA — KPPU meyakini putusan terhadap empat terlapor dalam kasus persekongkolan tender paket pekerjaan proyek bendungan di Tapanuli Utara dan Tengah sudah tepat, dan akan membuktikannya di PN Jakarta Selatan.

Staf litigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Manak SM Pasaribu mengatakan persidangan yang sudah berlangsung di KPPU membuktikan keampunannya berkolusi atas paket proyek dalam tahun anggaran 2015-2017. "Dari alat bukti yang ada, para terlapor sudah mengakui adanya persekongkolan," katanya kepada *Bisnis* pada akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan terdapat dua dugaan persekongkolan dalam

perkara ini yakni dalam persekongkolan horizontal dan vertikal.

Persekongkolan horizontal dibuktikan dengan adanya kesamaan kesalahan dalam dokumen penawaran, kerja sama dalam mempersiapkan surat jaminan penawaran antara terlapor II dan III.

Selain itu, adanya kesamaan alamat IP (*Internet protocol*) antara terlapor I, II, dan III dan juga terbukti adanya jabatan rangkap dalam dokumen penawaran terlapor II dan III, serta adanya kerja sama dalam mempersiapkan surat dukungan bank antara terlapor I dan terlapor II.

Empat terlapor itu yakni PT Kharisma Bina Konstruksi (terlapor I), PT Hariara (terlapor II), PT

Rudi Jaya (Terlapor III), dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultasi pada Satuan SNVT PIPA Sumatra II Sumut (terlapor IV).

Atas putusan itu, keempatnya mengajukan permohonan keberatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 318. Pdt.G.KPPU/2017/PN JKT.SEL.

Kuasa hukum PT Hariara Previary Annisa Rellina dari Kantor Hukum Rellina & Co mengatakan, gugatan ini dilakukan sebagai upaya hukum untuk membatalkan putusan KPPU.

"Kami menilai Majelis KPPU salah menilai apa yang telah kami lakukan dalam tender ini," ujarnya. (*Dimas Novita Sari*)

Menciptakan Lokomotif Wisata (*Sambungan dari Hal. 1*)

Tentunya untuk bisa merealisasikan hal tersebut, butuh kerja keras dan kesungguhan dari semua pihak terkait. Sektor pariwisata bukan hanya tugas dari Kementerian Pariwisata, tetapi melibatkan semua kementerian dan instansi pemerintah serta unsur pentahelix, dengan rumus ABCGM, yakni *academic, business, community, government*, dan media.

Menteri Pariwisata Arief Yahya telah menyampaikan konsep 3A (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas) sebagai prinsip dasar pembangunan pariwisata. Pemerintah pun telah memberikan bukti nyata perihal percepatan pembangunan infrastruktur, terutama aksesibilitas, untuk mendukung 10 Bali Baru.

Untuk destinasi Danau Toba, misalnya, pemerintah sudah merealisasikan restorasi Bandara Silangit yang akan dilanjutkan dengan pelebaran *runway*, pemasangan alat bantu navigasi Instrument Landing System dan ATC Tower pada 2018. Tak lupa jalan tol Medan—Tebing Tinggi yang sudah mulai dibangun dengan ruas Kualanam—Sei Rampah untuk mempermudah akses darat menuju ke Danau Toba.

Destinasi Tanjung Kelayang Belitang pun saat ini tengah mempersiapkan Geopark Pulau Belitang untuk bisa di-sahkan sebagai Unesco Global Geopark.

Sementara itu, destinasi Tanjung Lesung, Banten, yang juga sudah memiliki status KEK, sedang menyiapkan proyek infrastruktur Jalan Tol Serang—Panimbang. Pembebasan lahan untuk jalan tol itu ditargetkan rampung pada 2018.

Destinasi Kota Tua sudah memiliki paket-paket wisata tematik yang dirancang khusus untuk para wisatawan. Untuk meningkatkan aksesibilitas ke Kepulauan Seribu, Di Kepulauan Seribu Jakarta, Hotel Ritz Carlton tengah dibangun di Pulau Lancang dan resor mewah lainnya sedang dipersiapkan di Pulau Bira.

Untuk destinasi Borobudur, telah dibentuk Badan Otorita Pariwisata sebagai realisasi konsep *single destination, single management*. Peningkatan aksesibilitas darat, udara, dan laut juga tengah diusahakan.

Proyek Jalan Tol Bawen—Yogyakarta akan segera dilaunchkan. Pengerjaan Bandara Kulon Progo untuk peningkatan konektivitas udara juga sudah dimulai dan sudah dalam tahap akhir pembebasan lahan. Selain itu, untuk meningkatkan konektivitas laut, akan dilakukan optimalisasi Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang.

Untuk Jawa Timur, tahun ini Badan Otorita Bromo Tenger Semeru sudah masuk tahap penyusunan rancangan Perpres. Tiga proyek jalan tol juga sedang dikerjakan untuk peningkatan aksesibilitas, yaitu: Jalan Tol Pasuruan—Probolinggo, Probolinggo—Banyuw-

ngi, dan Malang—Pandaan.

Bergeser ke Mandalika, Lombok, pada Oktober 2017, Presiden Joko Widodo telah meresmikan beroperasinya kawasan ekonomi khusus.

Kemudian beralih ke Labuan Bajo, yang terus fokus membangun wisata baharinya dengan mengembangkan penataan kawasan pelabuhan, termasuk di dalamnya tata kelola wisata selam maupun kapal layar.

Penambahan penerbangan langsung Jakarta—Labuan Bajo juga menjadikan kemudahan wisatawan mengakses berbagai masuk ke area Taman Nasional Komodo. Tidak hanya itu, akses melalui pembangunan Jalan Strategis Nasional Lintas Utara Flores (Labuan Bajo—Bira—Reo) dan Lintas Selatan (Labuan Bajo—Warloka—Wae Rebo), akan semakin melengkapi Bandara yang dalam waktu dekat akan menjadi bandara internasional.

Selanjutnya, destinasi Wakatobi mendapatkan posisi ketiga dalam kategori Best Dive Centre or Resort 2017, Dive Travel Award, versi *Dive Magazine*, Inggris. Selain itu, pada Desember 2017, Garuda Indonesia telah meluncurkan penerbangan perdana dengan rute Makassar—Kendari—Wakatobi.

Terakhir, destinasi Morotai telah memiliki akses laut berupa jalur Morotai—Ternate dengan dua kapal, yang masing-masing melakukan perjalanan dua kali seminggu. Akses udara ke Morotai dari Ternate dengan maskapai Wings Air ATR72 juga sudah dilakukan reguler dengan sekali penerbangan setiap hari.

SEKTOR UNGGULAN

Sektor pariwisata sering sekali disebut sebagai *mother industry* karena memberi efek berganda untuk banyak sektor lainnya serta seluruh lapisan masyarakat. Lebih dari itu, bagi Indonesia, pariwisata merupakan sektor yang paling mudah dan murah untuk dikembangkan sebagai penggerak ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip TTI yang kita kenal (*trade, travel dan investment*) mungkin saat ini sudah berubah urutannya menjadi *travel, trade dan investment* terutama untuk generasi milenial.

Hal tersebut menjadikan pariwisata sebagai aspek penting dalam pembangunan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Pariwisata sudah menjadi sektor unggulan tidak hanya bagi Indonesia.

Dalam konteks makro, sektor pariwisata telah mengalami ekspansi dan diversifikasi berkelanjutan, dan menjadi salah satu sektor ekonomi yang terbesar dan tercepat pertumbuhannya di dunia.

Meskipun krisis global terjadi beberapa kali, jumlah perjalanan wisatawan internasional tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif. Dengan garis awal sebanyak 25 juta wisatawan pada 1950, jumlahnya mening-

kat ke 278 juta pada 1980, 528 juta pada 1995, dan 1,14 miliar pada 2014.

Industri pariwisata global mampu menyumbang US\$2,4 triliun pada PDB, dua kali lipat dari kontribusi industri otomotif, dan hampir 50% lebih besar dari industri kimia global.

PENCAPAIAN INDONESIA

Lalu di mana posisi sektor pariwisata Indonesia? Pada 3 tahun terakhir, sektor pariwisata kita telah mampu lari kencang dan destinasi wisata Indonesia mampu menyedot perhatian dunia. Terbukti, untuk skala Asia, pada 2013, sektor pariwisata Indonesia memberikan kontribusi tertinggi keempat, setelah China, Jepang, dan India.

Jumlah lapangan kerja yang tercipta di sektor pariwisata Indonesia pada 2014 juga berada di peringkat kelima, dengan total 2,9% dari penyerapan tenaga kerja nasional.

Walaupun penerimaan devisanya hanya setengah dari Malaysia dan seperempat dari Thailand pada 2014, namun pada 2016 sektor pariwisata telah menjadi penghasil devisa nomor dua untuk Indonesia (lompat dari sebelumnya nomor empat), dan diproyeksikan akan menjadi penghasil devisa nomor satu pada 2019.

Lompatan kinerja tersebut didukung oleh peningkatan indeks daya saing Indonesia. Menurut World Economic Forum (WEF) dalam *Travel and Tourism Competitiveness Report*, yang meningkat dari peringkat 70 pada 2013, menjadi peringkat 42 dunia pada 2017.

Peningkatan tersebut juga didukung dengan semakin banyaknya infrastruktur baru, utamanya peningkatan ketersediaan transportasi udara.

Sampai dengan November 2017, tercatat pertumbuhan kunjungan wisatawan di Indonesia naik hingga 22%, lebih dari tiga kali pertumbuhan Asean sebesar 7% dan pertumbuhan pariwisata global 6,4%. Pertumbuhan tersebut membuat Indonesia masuk ke dalam *top 20 fastest growing travel destination in the world*.

Dari segi branding, Wonderful Indonesia berada di peringkat 47, mengalahkan Thailand yang ada di peringkat 83, dan Malaysia pada peringkat 96.

Pada 2018, Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk beberapa *event* besar, seperti Asian Games dan Annual Meeting World Bank-IMF.

Adanya *event-event* besar ini diharapkan menjadi tambahan modal untuk sektor pariwisata Indonesia.

Last but not least, adanya CEO Commitment serta kerja keras seluruh pihak terkait memberikan keyakinan akan suksesnya program 10 Bali Baru sehingga betul-betul menjadikan sektor pariwisata sebagai *core economy* kita dan membuat Indonesia akan mempunyai banyak sekali destinasi pariwisata kelas dunia.

► PEMBAYARAN UTANG

Investor Siap Masuk Royal Industries

JAKARTA — Perusahaan sawit terintegrasi PT Royal Industries Indonesia mengaku mengantongi investor strategis untuk membantu perusahaan di masa restrukturisasi utang.

Dellana Pradhita Sari
dellana.pradhitasari@bisnis.com

Kuasa hukum PT Royal Industries Indonesia (debitur) Ibrahim Sjarief Assegaf dari kantor hukum Assegaf Hamzah & Partner mengungkapkan sudah ada investor yang masuk ke perusahaan yang sedang menjalani PKPU ini.

"Kami sudah bicara dengan beberapa investor. Awalnya ada banyak [investor] tetapi sekarang mengerucut dua saja," katanya dalam rapat kreditur, Kamis (25/1).

Dia menuturkan dua investor ini diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang konkret.

Diketahui dari pengurus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dua investor ini berasal dari grup taipan lokal asal Indonesia.

Saat ini Royal Industries tengah menyusun skema perdamaian terkait dengan kelanjutan usaha dan pembayaran utang ke kreditur. Untuk itu, debitur telah mendapatkan persetujuan untuk perpanjangan masa PKPU selama 60 hari.

Pengurus PKPU Royal Industries William E. Daniel mengatakan perpanjangan itu telah disetujui oleh mayoritas kreditor. Waktu 2 bulan akan digunakan untuk memamatkan negosiasi dengan investor.

"Sudah ada dua perusahaan besar di Indonesia yang berniat masuk sebagai investor. Ini investornya grup perusahaan besar," katanya tanpa menyebut nama grup tersebut, Minggu (28/1).

► **Pengurus PKPU menyebut dua calon investor berasal dari grup taipan lokal asal Indonesia dan tengah melakukan due diligence.**

► **Royal Industries kembali mendapat perpanjangan masa PKPU 60 hari.**

Perusahaan tersebut, lanjut dia, sudah melakukan *due diligence* terhadap PT Royal Industries yang berlokasi di Karawang ini.

Dalam rapat kreditur pekan lalu, mayoritas suara menyetujui perpanjangan PKPU selama 60 hari.

Terdapat 54 kreditor konkuren yang menghadiri rapat yang seluruhnya menerima perpanjangan.

Sementara itu, dari 22 kreditor separatis yang hadir dalam rapat, 18 di antaranya setuju perpanjangan PKPU dengan 81,81% suara.

Royal Industries merupakan perusahaan agroindustri sawit terintegrasi dari hulu ke hilir. Perseroan memproduksi minyak goreng dengan merek Green Lands dan White Pearl.

Total utang PT Royal Industries Indonesia yang perlu direstrukturisasi lewat PKPU mencapai Rp5,85 triliun dari 90 kreditor.

Pemegang tagihan terbesar yakni 18 sindikasi bank bernilai Rp5,38 triliun. Sindikasi bank itu terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Indonesia Eximbank, Deuts-

che Bank Cabang Singapura, First Gulf Bank PJSC Cabang Singapura, CTBC Bank Co. Ltd Singapura, PT Bank ICBC Indonesia, Siemens Financial Services, Inc dan PT Bank CTBC Indonesia.

SKEMA PEMBAYARAN

Dalam rapat kreditur, Ibrahim dan tim kuasa hukum lainnya juga menjabarkan perubahan skema pembayaran utang kepada kreditor.

Pembayaran kepada kreditor separatis atau dengan jaminan, debitur membagi menjadi dua grup, dari sebelumnya tiga grup.

Grup pertama yakni utang kepada bank milik negara atau pelat merah dan bank yang berdomisili di Indonesia. Total kewajiban kepada grup pertama ini sebesar US\$186,35 juta.

Pada grup ini, debitur meminta masa tenggang pembayaran atau *grace period* selama 5 tahun. Utang pokok akan dibayarkan dengan tenor 15 tahun setelah *grace period* berakhir. Bunga akan dibayar 1% per tahun.

Selanjutnya, kelompok kedua yakni kewajiban kepada bank luar negeri dengan total US\$212,64 juta.

Pembayaran di grup ini akan dibagi dua dengan skema persentase. Adapun 60% akan dibayar dengan diangsur dengan tenor 10 tahun dan *grace period* 5 tahun. Selanjutnya, 40% dibayar dengan obligasi wajib konversi bertenor maksimal 15 tahun.

Dalam proposal perdamaian terbaru, debitur mencatat kewajiban kepada karyawan Rp2,72 miliar. Tagihan karyawan akan dibayar selama setahun dan dibagi pro rata per kuartal.

Debitur juga memiliki kewajiban kepada kreditor konkuren (tanpa jaminan) sebesar Rp228,41 miliar. Skema pembayaran konkuren bermacam-macam tergantung karakternya baik pemasok pihak ketiga, pemasok terkait dan uang muka pelanggan. ☐



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 20 Februari 2018
Tempat : Ruang Bromo Lt.5, Gedung Bank Jatim Kantor Pusat
Jl. Basuki Rachmad 98 - 104 Surabaya
Waktu : 08.00 WIB - selesai

Dengan Mata Acara sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2017 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris;
3. Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018;
4. Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Melakukan Penyesuaian Permodalan Perseroan Dengan Demikian Merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Sehubungan Dengan Pelaksanaan *Management and Employee Stock Options Plan* (MESOP);
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
6. Laporan Proses Pelaksanaan *Spin Off* Unit Usaha Syariah.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

1. Mata Acara Rapat Ke-1, 2 dan 3 adalah yang disyaratkan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai anggaran dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 dan Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Mata Acara Rapat ke-4 adalah pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, sehubungan dengan pelaksanaan penerbitan saham baru dalam rangka *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 tanggal 8 April 2015;
3. Mata Acara Rapat Ke-5 terkait dengan perubahan susunan pengurus, Perubahan anggota Dewan Komisaris dikarenakan masa jabatan telah selesai dan pengangkatan penggantinya;
4. Mata Acara Rapat ke-6 melaporkan proses *Spin Off* Unit Usaha Syariah yang belum dilaksanakan pada tahun 2017 dan rencana pelaksanaan *Spin Off* dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Catatan:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 26 Januari 2018;
2. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diakses melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yakni www.bankjatim.co.id;
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara;
4. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, selambat-lambatnya pada tanggal 16 Februari 2018 pukul 16.00 WIB;
5. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan Pengurus terakhir.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 29 Januari 2018
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Direksi